



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

BULETIN
EDISI III
BAWASLU
KUTAI BARAT

SEPTEMBER - DESEMBER 2021

Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Di tengah pandemi Covid-19 yang mewabah, Bawaslu Kabupaten Kutai Barat hadir dan berada di hadapan pembaca, Melalui buletin edisi Ketiga ini saya redaksi ingin menyapa pembaca dengan karya publikasi bulletin “*Bawaslu Kabupaten Kutai Barat Edisi III September - Desember 2021*”

Sebagai informasi, gagasan, maupun fakta kami suguhkan dalam edisi ini, diantaranya; Kegiatan Bawaslu terkiat Persiapan menyongsong Pemilu 2024 serta peningkatan Kapastias Sumber daya Manusia dan kehumasan di senggang bulan September - Desember 2021.

Percikan-percikan pengetahuan itu tak lain sebagai upaya Bawaslu Kutai Barat untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Sebab, dengan pendidikan politik yang baik, ada secercah harapan bahwa sistem demokrasi di negeri tercinta ini juga semakin membaik.

Apalagi, salah satu ciri iklim demokrasi yang baik adalah ditandai dengan partisipasi masyarakat. Bukan hanya partisipasi menggunakan hak pilihnya, tapi juga partisipasi pengawasan dalam setiap tahapan yang ada.

Dengan hadirnya buletin ini, mudah-mudahan bisa memberikan asupan pengetahuan, sehingga bisa turut sama-sama mengawasi Kegiatan Non Tahapan dan Persiapan jalannya perhelatan lima tahunan Kedepan. Sebab, untuk menyukseskan Pemilu dan Pilkada, bukan hanya ada di tangan penyelenggara, tapi juga butuh keterlibatan dari banyak pihak; mulai dari peserta, Partai Politik, aparat keamanan, stakeholder, maupun masyarakat.

Tentu karya yang ada di tangan pembaca ini tidaklah sempurna, Sebab, hanya Tuhan pemilik kesempurnaan.

Dengan demikian, saran yang konstruktif dari pembaca dibutuhkan demi kemajuan buletin ini. Terimakasih. (*)

Daftar Isi

Berita dan Artikel

- **Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Kunjungi Bawaslu Kabupaten Kutai Barat**

Halaman : 4 – 5

- **Bawaslu Kabupaten Kutai Barat mengikuti Rapat Koordinasi Hukum dan Lanjutan Penulisan Legal Opinion**

Halaman : 6

- **Anggota Bawaslu Provinsi Kaltim Ebin Marwi Melakukan Pembinaan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran**

Halaman : 7

- **Selasa Baper (Bahas Perbawaslu)**

Halaman : 8

- **Rakor Daftar Pemilih Berkelanjutan**

Halaman : 9 - 11

Menjelang Pemilu 2024

- **Peningkatam Sumber daya Manusia dan Organisasi serta Rencana Persiapan Pembentukan Pengawas Ad Hoc Tahun 2022**

Halaman : 12– 13

- **Penyusunan Kurikulum Pendidikan Penyelesaian Sengketa**

Halaman : 14

- **Rapat terkait Tindak Lanjut Sosialisasi dan Monitoring Keterbukaan Informasi Publik**

Halaman : 15

Opini Bawaslu

- **Pemilu 2024 : Antara Kepentingan dan Kebutuhan ?**

Halaman : 16 - 17

Potret Kegiatan Bawaslu Kubar

Halaman : 18– 20

Penanggung Jawab : Risma Dewi, SKM , **Redaktur** : Yohanes Dody Jaka Rinda, S.Kom,

Desain Grafis : Dody Wahyudi, S, **Fotografer** : Mikael Theo, S.Kom , **Sekretariat** : Nurul Hidayah, S.Sos ,

Pembuat Artikel : Romi Purwanda, S.IP dan Sofiana I'in Ayuni, S.H

Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok

Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur



Berita & Artikel

September - Desember 2021

Buletin Edisi III

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Kunjungi Bawaslu Kabupaten Kutai Barat



Kunjungan Ketua Bawaslu Prov Kaltim Dr. Saiful, S.Sos., M.Si di Bawaslu Kab Kutai Barat

KPU Bapak Johannes Nuel, menyampaikan bahwa sekarang masih terus berlangsung diverifikasi untuk data dan segera akan dikoordinasikan dengan pihak Capil untuk sama-sama menyesuaikan data yang ada agar tidak ada misskomunikasi.

“Untuk sementara data yang sudah diverifikasi ada didalam map ini, selanjutnya

Bawaslu Kabupaten Kutai Barat, Senin (30/08/2021) mendapat kunjungan Dr. Saiful, S.Sos., M.Si terkait monitoring kegiatan uji petik sejumlah data pemilih yang sudah di mutakhirkan KPU Kabupaten Kutai Barat pada proses Penyusunan daftar pemilih berkelanjutan (DPB). Uji petik ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Bawaslu Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan. Bawaslu Kabupaten Kutai Barat mendatangi KPUD Kabupaten Kutai Barat mendampingi Ketua

Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur untuk uji petik terkait dengan PPDP.

Disambut ketua dan anggota komisioner KPUD Kabupaten Kutai Barat Bawaslu Kubar beserta Ketua Bawaslu Provinsi Kaltim langsung dibawa menuju ruang rapat untuk berdiskusi mengenai Pengawasan Pemuk-tahiran Data Pemilih Lanjutan. Dalam paparan yang disampaikan oleh anggota komisioner



Penyerahan Berita Acara Daftar Pemilih Berkelanjutan Oleh Ketua KPU Kutai Barat kepada Ketua Bawaslu Kab. Kubar

kami akan sandingkan data kami dengan data dari Capil agar data sinkron dan tidak ada misskomunikasi lagi mengenai data ini.”

Ketua Bawaslu Provinsi Kaltim, Saiful, S.Sos., M.Si menyampaikan agar data dari kabupaten/kota segera diberikan kepada stakeholder agar data bisa sama-sama dicocokkan karna data akan segera diupdate di Provinsi hingga ke RI. "Pada dasarnya kita sama-sama bekerja dijalur yang sama, yaitu agar kasus daftar pemilih tidak amburadul seperti sebelum



Foto Bersama Ketua Bawaslu Prov. Kaltim Dr.Saiful, S.Sos., M.Si dengan Ketua Bawaslu Kutai Barat beserta Anggota dan Ketua KPU Kutai Barat dan Anggota

-sebelumnya apalagi 2024 ini nanti pemilihan serentak. "Yaa agar supaya kita tidak pusing, juga data yang ada di kita sekarang ini agar cepat dikirimkan ke Provinsi dan RI, jadi yaa kita saling kerjasama yang baik" sebut Saiful.

KPU Kabupaten Kutai Barat melalui berita acara yang diberikan kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Barat mengumumkan Data Pemilih Perubahan Bulan September 2021.

Data ini merupakan angka yang diberikan kepada Bawaslu Kubar untuk melihat berapa jumlah masyarakat yang pindah masuk, pindah keluar dan meninggal .

Jumlah pemilih terbaru yang tercatat sebanyak 114.079 (Seratus Empat

Belas Ribu Tujuh Puluh Sembilan) Pemilih, dengan rincian pemilih Laki-laki sebanyak : 59.848 (Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan) Pemilih dan Pemilih Perempuan sebanyak : 54.231 (Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu) Pemilih yang tersebar di 16 (Enam Belas) Kecamatan se-Kabupaten Kutai Barat.



Rapat Bersama Ketua Bawaslu Prov. Kaltim Dr.Saiful, S.Sos., M.Si dengan Ketua Bawaslu Kutai Barat beserta Anggota dan Ketua KPU Kutai Barat dan Anggota serta sekretaris KPU Kutai Barat di Ruang Rapat KPU Kutai Barat

BULETIN EDISI III
BAWASLU KABUPATEN KUTAI BARAT

BULETIN EDISI III
BAWASLU KABUPATEN KUTAI BARAT



Berita & Artikel

Buletin Edisi III

Bawaslu Kabupaten Kutai Barat mengikuti Rapat Koordinasi Hukum dan Lanjutan Penulisan Legal Opinion



Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Barat Lourensus, S.Sos Mengikuti Zoom Meeting Koordinasi Hukum dan Lanjutan Penulisan Legal Opinion

Bawaslu Kabupaten Kutai Barat mengikuti rapat daring melalui zoom yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Kamis, (30/06/2021) “Rapat Koordinasi Hukum dan Lanjutan Penulisan Legal Opinion”.

Dalam lanjutan pembuatan Legal Opinion ini terbagi beberapa tema yakni *Pertama*, Komposisi keanggotaan bawaslu Kab/Kota yang ideal dalam menyelenggarakan pemilu dan pemilihan serentak 2024. *Kedua*,

Penyatuan tempat pendaftaran pemantau antara di Bawaslu atau di KPU. *Ketiga*, Kewenangan Bawaslu yang permanen seiringan dengan dipernekannya kelembagaan sampai tingkat Kabupaten/Kota. *Ke-empat*, Tugas Bawaslu yang permanen seiringan dengan dipernekannya kelembagaan sampai tingkat Kabupaten/Kota. *Ke-lima*, Penyamaan waktu penanganan pelanggaran antara pemilu dengan pemilihan. *Ke-enam*, Konsistensi metode, produk, dan tindaklanjut penanganan

peanggaran administrasi Pemilu dengan Pemilihan. *Ke-tujuh*, Penggunaan metode yang sama dalam verifikasi faktual terhadap syarat keanggotaan parpol, dukungan DPD dalam Pemilu dan dukungan calon perseorangan Pemilihan. *Delapan*, Pemberlakuan syarat nomor rekening dana kampanye yang sama terhadap calon peserta Pemilu. *Sembilan*, Memastikan keabsahan kepengurusan parpol ditingkat kecamatan minimal 50% per

Kab/Kota melalui Verifikasi faktual.

Dalam upaya peningkatan kapasitas terkait beberapa tema diatas maka akan dilaksanakan presentasi legal opinion yang telah dibuat oleh seluruh Bawaslu Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Timur yang membidangi divisi hukum. Adapun dengan mengadakan agenda mingguan setiap hari kamis pukul 10.00 Wita.

Anggota Bawaslu Provinsi Kaltim Ebin Marwi Melakukan Pembinaan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran



Anggota Bawaslu Prov.Kaltim Ebin Mawri, SH., MH dalam Rapat bersama Ketua Bawaslu Kutai Barat Risma Dewi,SKM dan Anggota Lourensus, S.Sos

SENDAWAR, Anggota Bawaslu Kalimantan Timur Ebin Marwi melakukan pembinaan pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah di Bawaslu Kabupaten Kutai Barat, Rabu 22 September 2021.

Dalam kesempatan ini turut hadir Ketua Risma Dewi, Koordinator Divisi HPPS -

Lourensus dan Koordinator Sekretariat Eko Budi Trimanto dan beberapa staff yang hadir, dalam hal ini Ebin Marwi berpesan agar unit pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Pembinaan terhadap pengelolaan barang dugaan pelanggaran ini merupakan upaya berkelanjutan yang dilakukan untuk melihat sejauh mana surat edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021. Dalam kesempatan ini agar Bawaslu Kabupaten Kutai Barat melalui unit Pengelola barang dugaan pelanggaran agar dapat membuat buku register barang

dugaan pelanggaran dan agar dapat menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemilik atau pihak yang menyerahkan barang dugaan pelanggaran untuk mengambil barang tersebut di Kantor Bawaslu Kabupaten Kutai Barat paling lama 7 hari kerja sejak disampaikannya surat pemberitahuan.

Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan si pemilik tidak mendatangi Kantor



Staf Sekretariat Bawaslu Kutai barat Mengikuti Pembinaan terhadap pengelolaan barang dugaan pelanggaran

Bawaslu Kabupaten Kutai Barat maka unit pengelolaan barang dugaan pelanggaran mengumumkannya pada Halaman resmi selama 7 hari kerja. Jika tidak terdapat tanggapan dari pemilik barang, maka barang tersebut dinyatakan tidak di ketahui atau tidak ditemukan.

Selasa Baper

(Bahas Perbawaslu)

**Divisi Hukum,
Penanganan
Pelanggaran dan
Sengketa
melakukan
agenda selasa
BAPER**



Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Barat Lourensus, S.Sos memimpin dalam kegiatan Selasa Baper (Bahas Perbawaslu)

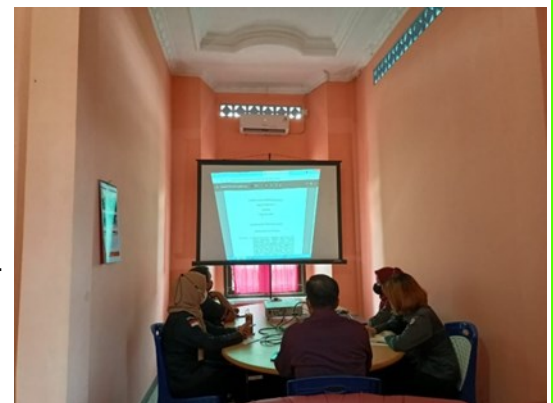
Salah satu divisi pada Bawaslu Kabupaten Kutai Barat yakni Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Sengketa melaksanakan agenda rutin setiap minggunya pada hari selasa pukul 10.00 Wita. Agenda yang dikenal nama SELASA BAPER (Selasa Bahas Perbawaslu).

Dalam upaya Peningkatan kapasitas penanganan dan penyelesaian sengketa pemilu dan pilkada menyongsong Pemilu 2024, hal ini bertujuan untuk peningkatan kapasitas staf Bawaslu Kubar dalam hal menerima laporan penyelesaian sengketa proses pemilu dan menangani proses penyelesaian sengketa

secara maksimal sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Adapun pembahasan terkait pada perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Perbawaslu

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,



serta Walikota dan Wakil Walikota. Selain melakukan bedah perbawaslu pasal demi pasal dilakukan juga terkait pemabahsan terhadap kajian terhadap Legal Opinion yang telah dipresentasikan.

Rapat Koordinasi

Daftar Pemilih Berkelanjutan

Hari Kamis 23 September 2021, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) Bawaslu Kutai Barat mendatangi KPU Kutai Barat dalam rangka menghadiri undangan terkait dengan koordinasi pemuktahiran daftar pemilih berkelanjutan.

Kegiatan yang dilaksanakan di ruang rapat KPU Kabupaten Kutai Barat ini dihadiri pula oleh para stakeholder terkait yaitu Kesbangpol Kutai Barat, Kodim 0912 Kutai Barat, Polres Kutai Barat, Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim, Disdukcapil Kutai Barat dan Bawaslu Kabupaten Kutai Barat.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan rapat koordinasi pemuktahiran data pemilih berkelanjutan yaitu untuk membentuk forum komunikasi dengan para stakeholder terkait yang ada di Kabupaten Kutai Barat guna memperbaharui data pemilih untuk mempermudah proses pemuktahiran data dan penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilu/Pemilihan berikutnya.

Pelaksanaan Kegiatan ini sesuai



Ketua Bawaslu Kutai Barat Risma Dewi, SKM saat Mengikuti Rapat Stakeholder mengenai Daftar Pemilih Berkelanjutan di KPU Kutai Barat

dengan Amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada Pasal 20 huruf (I), KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemuktahiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017, Pasal 27 ayat (3), menyatakan setelah pemungutan suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota memasukan data DPTb pada Informasi Data Pemilih guna Pemuktahiran Data Pemilih berkelanjutan untuk Pemilihan atau Pemilu

berikutnya dan Amanat Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018, Pasal 58 ayat (1), menyatakan KPU menggunakan hasil kegiatan penyusunan Daftar Pemilih sebagai bahan dalam kegiatan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan, serta Surat KPU RI nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 perihal perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021.

Ketua KPU Kutai Barat didampingi oleh Anggota Komisioner membuka secara resmi kegiatan tersebut



Ketua Bawaslu Kutai Barat Risma Dewi, SKM, Ketua KPU dan Anggota serta Stakeholder terkait saat Mengikuti Rapat Stakeholder mengenai Daftar Pemilih Berkelanjutan di KPU Kutai Barat

pada pukul 10.00 WITA. Ketua KPU Kutai Barat menyampaikan bahwa KPU Kabupaten Kubar dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan ini, membuka layanan Pelaporan dan Tanggapan Masyarakat, baik secara online maupun secara offline.

Diharapkan Masyarakat dapat berperan aktif dalam pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan ini. Adapun Pelaporan Masyarakat dalam memberikan tanggapan/ masukan terhadap Data Pemilih berupa :

1. Memperbaiki Elemen Data

- Pemilih
- 2. Pemilih Baru (berusia 17 tahun sejak tanggal dan sudah melakukan perekaman E-KTP)
- 3. Pindah Domisili
- 4. Baru menjadi anggota TNI/ POLRI
- 5. Purna dari TNI/ POLRI
- 6. Adanya anggota keluarga yang sudah meninggal dan kondisi lainnya.

Dalam kesempatan yang sama KPU Kutai Barat menyampaikan masalah dan hambatan terkait data yang terkesan tidak bergerak secara signifikan dikarenakan sulit mendapatkan data dilapan-

gan, dikarenakan tidak adanya PPK sehingga tidak ada perpanjangan tangan KPU di tiap kecamatan. Oleh sebab itu KPU Kutai Barat mengharapkan kerjasama dari para stakeholder terkait terutama Disdukcapil Kutai Barat agar bisa memberikan data yang dibutuhkan sehingga data bisa tercover dengan baik.

Terkait kegiatan rapat koordinasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilaksanakan, Bawaslu Kutai Barat menyampaikan apresiasi tinggi kepada KPU Kutai Barat yang mengajak seluruh stakeholder

untuk berkerjasama melindungi hak pilih agar tercatat dalam daftar pemilih berkelanjutan guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu/Pemilihan berikutnya.

Bawaslu Kutai Barat mengharapkan untuk Kegiatan rapat koordinasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan kedepan, KPU Kutai Barat dapat lebih mengembangkan peserta dengan melibatkan lembaga-lembaga lain seperti, Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan. Mengingat saat ini sedang pada situasi pandemi dan data-data kematian ini berada

dilembaga-lembaga tersebut. Bawaslu Kutai Barat juga akan terus memberikan saran perbaikan terkait data pemilih berkelanjutan hasil pengawasan dan pencermatan dan akan terus mengingatkan kepada KPU Kutai Barat untuk mengumumkan Hasil Rekapitulasi DPB. Dimana dapat diumumkan melalui berbagai media, seperti papan pengumuman di website resmi, portal aplikasi dan media sosial, serta membuat siaran pers di media cetak maupun media elektronik.

Pantau !!! Pemutakhiran DPB Untuk Pemilu yang Berkualitas





Menjelang Pemilu 2024

September - Desember 2021

Buletin Edisi III

Peningkatam Sumber daya Manusia dan Organisasi serta Rencana Persiapan Pembentukan Pengawas Ad Hoc Tahun 2022

Sendawar, Anggota Bawaslu Kutai Barat Muhtar Kusuma Atmaja, SE selaku coordinator Divisi SDM Organisasi data dan Informasi beserta staf menghadiri undangan Bawaslu Provinsi tentang Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Organisasi serta Rencana Persiapan Pembentukan Pengawas Ad Hoc Tahun 2022 di Hotel Grand Elty Kabupaten Kutai Kartanegara, Senin 20 September 2021.

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka peningkatan dari sisi kualitas sumber daya manusia jajaran pengawas secara keseluruhan yang perlu dilakukan sejak dini, sebagai bagian dari persiapan menyambut Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024.

Dalam Kegiatan ini terdapat dua Narasumber yaitu Dekan Fakultas Fisip Universitas Mula-warman serta Mantan Ketua



Bawaslu Republik Indonesia Periode 2008—2012 Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Dua persoalan akan tetap menjadi persoalan klasik pada Pemilu 2024, yakni daftar pemilih dan praktik politik uang. Hal itu disampaikan Mantan Ketua Bawaslu Republik Indonesia tersebut, “Problematika pemilu yang akan tetap terjadi bagi KPU adalah permasala-

han daftar pemilih, sedangkan bagi Bawaslu adalah bagaimana menghentikan praktik politik uang,” ujar Nur Hidayat Sarbini

Bawaslu harus menyiapkan SDM dalam hal pengawasan Pemilu dan Pilkada pada tahun 2024 yang akan dimulai tahapannya pada tahun 2022, yang berintegritas, profesional, serta sesuai dengan peraturan dan perundan-



Foto Bersama Staf Bawaslu Kutai Barat dan Staf Bawaslu Kabupaten / Kota Se- Kalimantan Timur saat Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Organisasi serta Rencana Persiapan Pembentukan Pengawas Ad Hoc Tahun 2022 di Hotel Grand Elty Kabupaten Kutai Kartanegara, Senin 20 September 2021

undangan yang berlaku. Seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu wajib mencari SDM pengawas yang dapat mengawasi Pemilu dan Pilkada 2024 secara baik dan benar, serta bertugas sesuai dengan amanah Undang – Undang, Perbawaslu, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan kepemiluan.

Bawaslu Kabupaten Kutai Barat akan segera mempelajari dan mempersiapkan apa yang menjadi standardisasi kompetensi pengembangan sumber daya manusia (SDM) di semua bidang keahlian standar kompetensi menjadi hal yang penting dilaksanakan dan perlu segera dirumuskan untuk meningkatkan ka-

pasitas para pengawas pemilu, pengembangan kompetensi dasar diperlukan bagi pengawasan misal pada awal tahapan pemilihan. Seperti kompetensi pengawasan data pemilih, pengawasan dana kampanye, dan kemampuan investigasi.

kelompok pertama yang perlu dilatih sebelum tahapan pemilu 2024 ini adalah komisioner dan sekretariat. Hal ini karena tahapan pemilu di tahun 2022 sudah akan dimulai.

Menambah perumusan standardisasi dan kompetensi bagi SDM di Bawaslu harus segera dilakukan untuk

menghadapi perubahan kultur terhadap SOTK baru dan menjalankan Undang-Undang Pemilu No.7 Tahun 2019.



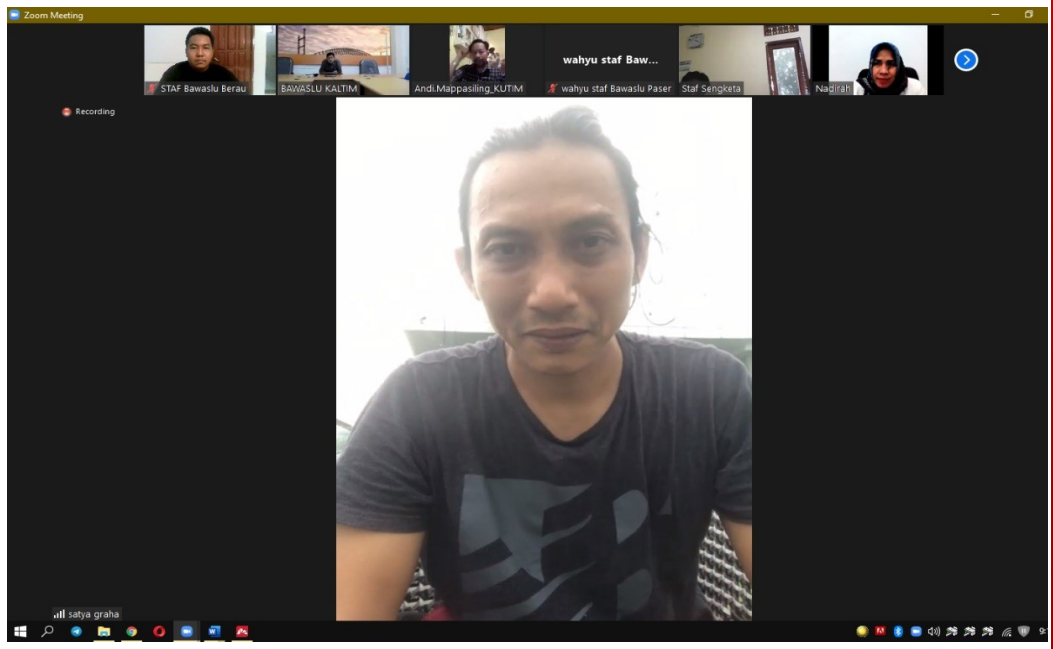
Dalam Hal ini Bawaslu Kabupaten Kutai Barat siap untuk merekrut Pengawas Ad Hoc di Tahun 2022 Mendatang.

Penyusunan Kurikulum Pendidikan Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir (*ultimum remidium*) bagi para

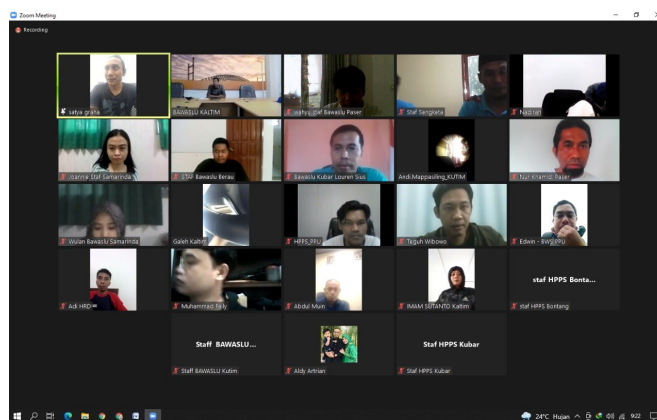
pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak membuahkan hasil.

Bawaslu Republik Indonesia ingin ada kurikulum pelatihan bagi staf dan majelis sidang dalam penyelesaian proses sengketa pemilu. Kurikulum sangat penting agar ketika menjalankan tugasnya bisa lebih dalam menggali informasi sebelum mengambil keputusan dan juga kurikulum penting juga sebagai dasar bagi komisioner dan staf dalam menghadapi sengketa proses pemilu.



Kurikulum ini nantinya akan memuat dua kepentingan, kurikulum pendidikan majelis dan kurikulum pendidikan untuk pani-

yang harus dimiliki agar kompetensi itu didapat. Dengan adanya kurikulum ini sehingga pihak yang berwenang mengetahui kira-kira kapasitas apa atau kompetensi yang harus dimiliki seperti apa.



tia. Kurikulum ini akan berbicara mengenai kompetensi apa yang hendak didapat, lalu kemudian diturunkan lagi, keterampilan apa

Pada dasarnya majelis dan panitia yang mempunyai peran yang berbeda, perbedaannya di Bawaslu adalah pihak yang menjadi majelis itu bertindak memeriksa dan memutus perkara, sedangkan yang menjadi panitia bagaimana menjalankan sehingga proses memeriksa dan memutus perkara itu berjalan dengan baik.

Rapat terkait Tindak Lanjut Sosialisasi dan Monitoring Keterbukaan Informasi Publik

Bawaslu terus berupaya menjadi lembaga yang terbuka bagi publik yang ingin mengetahui informasi terkait pengawasan pemilu maupun pilkada. Beberapa hal telah dilakukan, salah satunya dengan menggunakan standar penilaian dari Komisi Informasi Pusat Masih terdapat 11 persen jajaran Bawaslu yang masuk dalam kategori tidak informatif, 14 persen kurang informatif, cukup informatif 14 persen, menuju informatif 14 persen, dan 44 persen dinyatakan informatif (KIP).



Atmaja, SE dan Lourensus, S. Sos Sendawar Senin, 08 November 2021

namun krusial dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam pelayanan informasi publik dalam pengelolaan data dan informasi di Bawaslu Kabupaten Kutai Barat merupakan sesuatu hal baru, sehingga kedepannya diharapkan PPID menjadi lebih baik dan kreatif .

Anggota Bawaslu Divisi SDM Organisasi Data Dan Informasi Muhtar Kusuma Atmaja, SE mengatakan, “strategi yang dapat digunakan dalam penyampaian informasi menggunakan kanal-kanal media sosial dengan schedule waktu dan juga dengan infografis, sehingga dapat menarik apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat”. (8/9/2021)

Maka dari hal itu untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan dan pelayanan dalam Keterbukaan Informasi Publik dengan tidak adanya tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, kemungkinan akan banyak permohonan informasi dari masyarakat, itu merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu.

Dari itu Bawaslu Kabupaten Kutai Barat melaksanakan Rapat terkait Tindak Lanjut Sosialisasi dan Monitoring Keterbukaan Informasi Publik Rapat di Buka Oleh Ketua Bawaslu Kutai Barat Risma Dewi, SKM di Dampingi Oleh Anggota Bawaslu Kutai Barat Muhtar Kusuma

Dalam Hal Keterbukaan Informasi Publik tantangan lainnya adalah bagaimana kita bisa mempertahankan prestasi yang telah diraih di tahun 2020, karena untuk mempertahankannya lebih berat daripada meraihnya, maka perlu semangat yang sama untuk mengelola PPID dengan sebaik-baiknya sesuai batas kewenangan .

Ada tiga hal yang bisa menjadi ukuran evaluasi dari PPID, yaitu pelayanan, inovasi, dan laporan pelayanan, tiga hal tersebut terlihat simple



Rapat kerja bersama antara pemerintah, DPR, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI belum dapat menghasilkan keputusan tentang jadwal dan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Perbedaan pendapat masih terjadi di antara mereka.

KPU telah mengusulkan waktu pemungutan suara pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres) pada 21 Februari 2024 serta pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 27 November 2024 kepada Tim Kerja Bersama yang sudah dibentuk sejak April 2021. Untuk durasi tahapannya, KPU mengusulkan seluruh tahapan berlangsung selama 25 bulan atau lebih lama daripada Pemilu 2019, yakni 20 bulan. Dalam rapat kerja bersama antara pemerintah, Komisi II DPR, dan KPU pada 16 September lalu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, efisiensi anggaran dan stabilitas politik menjadi alasan pemerintah menolak usul KPU. Penyelenggara pemilu itu mengusulkan pemungutan suara pada 21 Februari 2024. Sedangkan pemerintah

mengajukan 15 Mei 2024 sebagai tanggal pelaksanaan pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres).

Bila 15 Mei 2024 dipilih sebagai tanggal pencoblosan pileg dan pilpres, dikhawatirkan waktunya akan terlalu berimpitan dengan pilkada pada November 2024. Apalagi bila pileg dan pilpres berlangsung dua putaran dan terjadi perselisihan di Mahkamah Konstitusi (MK), seluruh proses itu diperkirakan baru tuntas pada September 2024. Kebimbangan tersebut mungkin saja tidak akan dialami pemerintah. Dengan catatan apabila pada Maret lalu pemerintah dan DPR tidak bersepakat mengeluarkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dari Program Legislasi Nasional Prioritas 2021. Konsekuensi dari keputusan itu adalah pileg, pilpres, dan pilkada akan diselenggarakan secara bersamaan pada 2024.

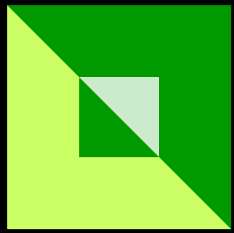
Sebagai lembaga teknis yang telah berpengalaman melaksanakan pesta demokrasi 5 tahunan, KPU tentunya telah mempertimbangkan dengan matang berbagai irisan tahapan pemilu dengan pilkada, kendala teknis, serta tantangan kompleksitas Pemilu dan Pilkada 2024, dan mungkin telah menyiapkan solusi dan penyelesaian melalui rancangan serta simulasi, yang nantinya akan dituangkan dalam PKPU Tahapan, Program, dan Jadwal yang akan dan mestinya segera di sosialisasikan. Mengingat, tahapan pemilu harus segera dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang



Terkait dengan keberatan pemerintah mengenai konstelasi politik yang memanas lebih awal merupakan konsekuensi atas pilihan tidak merevisi UU Pemilu dan UU Pilkada. Pemerintah dan DPR sebagai perwakilan partai politik harus bersiap lebih dini untuk menghelat demokrasi elektoral 2024. Begitu pun seluruh penyelenggara pemilu baik KPU, Bawaslu, dan DKPP telah siap melaksanakan amanat UU No. 7 tahun 2017 serta UU No. 10 tahun 2016 yang diputuskan tidak direvisi. KPU RI misalnya, telah membuat rancangan beberapa Peraturan KPU untuk mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024. Sedangkan terkait penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi pasca pandemi merupakan problem semua negara di dunia. Semua pihak baik pemerintah, DPR, maupun penyelenggara pemilu

memiliki konsekuensi yang harus dijalankan dengan konsisten atas ditetapkannya Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Akhirnya, semua pihak pemangku kepentingan pemilu sudah seharusnya secara legowo dan ksatria mempersilahkan KPU untuk menentukan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara sesuai perintah undang-undang.





Potret Kegiatan

Buletin Edisi III

September - Desember
2021



Anggota Bawaslu Kutai Barat Muhtar Kusuma Atmaja, SE (Kedua Kiri Belakang) Foto Bersama Koordinator Divisi SDM Organisasi Bawaslu Kabupaten Kota Se-Kalimantan Timur dalam Rapat Peningkatan Sumber daya Manusia dan Organisasi serta Rencana Persiapan Pembentukan Pengawas Ad Hoc Tahun 2022



Kegiatan Selasa Baper (Bahas Perbawaslu) yang di lakukan Oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Barat Koordinator Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Lourensius, S.Sos Bersama Staf Divisi Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Sengketa



Dokumentasi Rapat Evaluasi penyelesaian sengketa Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum Toni Bowo Satoto, SH Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur bersama Ketua Bawaslu Kutai Barat Risma Dewi, SKM, Anggota Muhtar Kusuma Atmaja, SE dan Lourensius, S.Sos beserta Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kutai Barat, Selasa 26 Oktober 2021



Dokumentasi Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Galeh Akbar Tanjung melakukan monitoring ke Bawaslu Kabupaten Kutai Barat, di Hadiri Oleh Ketua Bawaslu Kutai Barat Risma Dewi, SKM, Anggota Muhtar Kusuma Atmaja, SE dan Lourensius, S.Sos Koordinator Sekretariat Eko Budi Trimanto, SE beserta Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kutai Barat



Dokumentasi Rapat terkait Tindak Lanjut Sosialisasi dan Monitoring Keterbukaan Informasi Publik bersama Ketua Bawaslu Kutai Barat Risma Dewi, SKM, Anggota Muhtar Kusuma Atmaja, SE dan Lourensus, S.Sos, Koordinator Sekretariat Eko Budi Trimanto, SE beserta Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kutai Barat



Dokumentasi Kunjungan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Dr. Saipul, S.Sos., M.Si ke Bawaslu Kabupaten Kutai Barat, di Hadiri Oleh Ketua Bawaslu Kutai Barat Risma Dewi, SKM, Anggota Muhtar Kusuma Atmaja, SE dan Lourensus, S.Sos



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

BERSAMA RAKYAT

AWASI

PEMILU

BERSAMA BAWASLU

TEGAKKAN

KEADILAN PEMILU